



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 81 /KEP/BPP/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat secara terbuka, efisien, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

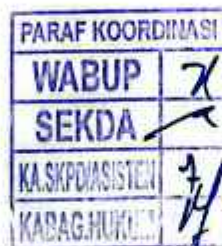


Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Nomor Rekening 2.16.02.2.01.06.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang; dan
3. Komisi Informasi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 81 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	-
	a. Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	b. Ruang lingkup kegiatan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	c. Visi dan misi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	d. Maksud dan tujuan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	e. Struktur organisasi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	f. Gambaran umum setiap satuan kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	g. Profil singkat pejabat struktural	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	Nama	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	

	Nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	Alamat unit/satuan kerja pejabat	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	Latar belakang pendidikan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	Penghargaan yang pernah diterima	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	a Nama program dan kegiatan;	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	b Penanggungjawab, pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	c Target dan/atau capaian program serta kegiatan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	d Nakwal Pelaksanaan program dan kegiatan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	e Anggaran program dan kegiatan yang meliputi pember dan jumlah	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	f Yang diakhiri dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran dan dokumen anggaran lainnya	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
g	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	

	h Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran dan dokumen anggaran lainnya	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	i Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	j Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah, waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah, agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan.							
	k Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	l Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	

3	Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	a Pengumuman penerimaan pegawai dilingkungan Badan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	b Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai dilingkungan Badan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	c Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	d Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	e Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	f Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	g Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi, hasil seleksi penerimaan pegawai yang diikuti	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
4	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, selanjutnya meliputi:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
	a Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	

	tahap seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi						
	b. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	c. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam Setiap lembaga pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	d. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	e. Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	f. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	g. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
5	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa menyebutkan tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan peserta capaian yang sekurang-kurangnya berisi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku

b	Efisiensi dana yang dicapai	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
c	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun kedepan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
d	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
e	Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
f	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
g	Data statistik tentang kegiatan bila ada	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
6	Ringkasan Laporan keuangan yang sekurang kurangnya terdiri atas :	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
a	Neraca dan laporan realisasi Anggaran	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
b	Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
c	Data Aset dan Investasi	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
7	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas :	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
a	Jumlah Permintaan informasi yang diterima	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku	

	Informasi	Komunikasi dan Informatika					
	c Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	d Alasan penolakan informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
8	Informasi tentang Peraturan dan atau Keputusan yang mengikat Publik yang	Bagian Hukum	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	a Daftar Rancangan dan tahap perumusan bagi Peraturan, Keputusan dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Hukum	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	b Daftar Dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan	Bagian Hukum	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
	c Daftar Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Bagian Hukum	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
9	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara menyelesaikan sengketa Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
10	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Dinas Komunikasi dan Informatika	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku
11	Informasi tentang prosedur Peringatan Dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor dan badan Publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2026	✓		✓	Sepanjang masih berlaku

12	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang / jasa Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2026	V		V	Sepanjang masih berlaku	-
----	---	----------------------------------	------	---	--	---	-------------------------	---



BUPATI PADANG PARIAMAN,

 JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 81 / KEP/BPP/2026
TANGGAL 23 Februari 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODE FIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Kebijakan Perangkat Daerah sekurang kurangnya terdiri	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	2/ Dokumen pendukung seperti Naskah Akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut.	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	b/ Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kajian tersebut.	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	c/ Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-

PARAF KOORDINATOR
WABUP
SEKDA

	d	Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	e	Tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	f	Daftar Peraturan, keputusan, kebijakan yang telah diterbitkan	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	g	Seluruh informasi lengkap yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala	Perangkat Daerah/Bagian Hukum	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
2		Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	a	Pedoman pengelolaan administrasi, personil, dan keuangan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	b	Profil Lengkap Pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	c	Anggaran badan Publik secara umum maupun secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
	d	Data statistik yang dibuat oleh badan publik	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
3		Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tupoksinya	Perangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-

PARAF KOORDINATOR
WABUP
SEKDA
KASUBKOR
WAKOR

4	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
5	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan, dan atau tidak dikeluarkan, berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
6	Informasi tentang Juklak/Juknis, Buku Pedoman, data Satuan Kerja Perangkat Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur dan <i>International Organization for Standardization</i>	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
7	Informasi tentang kajian, Naskah Akademik dan sejenisnya yang dibuat oleh Perangkat Daerah	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
8	Data perbendaharaan atau inventarisasi	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
9	Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Publik	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
10	Agen kerja pimpinan Badan Publik	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
11	Informasi mengenai kegiatan layanan	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-
12	Informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang							
12	Informasi Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku	-

	laporan penindakannya						
13	Informasi Daftar serta hasil penelitian yang di lakukan	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku -
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku -
15	Daftar informasi publik lainnya yang dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku -
16	Aplikasi e-Government	Parangkat Daerah	2026	✓		✓	Selama masih berlaku -



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARLAMAN
NOMOR 81 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 23 Februari 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODE FIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Ancaman keamanan kesehatan masyarakat	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
2	Ancaman keterlibatan umum	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
3	Ancaman bencana alam	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
4	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
5	Informasi karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
6	Informasi tentang keadaan bencana non-	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-

	alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan							
7	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
8	Informasi tentang jenis, penyebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-
9	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilita publik.	Perangkat Daerah	2026	✓			Selama berlaku	-

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	WABUP	✓
	SEKDA	✓
	KASUBINTEK	✓
	KABAS HUKUM	✓